

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini peneliti membahas mengenai: sekilas mengenai etnis Tionghoa di Indonesia, perbedaan karakter Tionghoa di Indonesia khususnya di Kota Singkawang, stereotip yang melekat pada etnis Tionghoa, batasan spasial dan temporal dalam penelitian, alasan peneliti tertarik melakukan penelitian seputar masyarakat tionghoa Singkawang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, juga ada struktur organisasi skripsi.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia penduduk nya sangat heterogen, yakni terdiri ragam etnis dengan ragam latar belakang yang khas dan berbeda antar satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini, peneliti memilih etnis Tionghoa untuk dikaji dalam skripsi dikarenakan etnis ini memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Di mana sejak era kolonial hingga reformasi topik mengenai etnis Tionghoa selalu menarik jika diangkat. Seperti yang diutarakan oleh (Gungwu,1981,hlm.261-264) bahwa "Indonesia negara yang mempunyai masalah etnis Tionghoa begitu kompleks".

Jika diperhatikan dengan seksama permasalahan etnis Tionghoa ini bisa terjadi dikarenakan etnis Tionghoa di negara Indonesia, dalam dinamika kehidupannya dipengaruhi oleh pemerintahan atau politik yang sedang berkuasa. Yakni sejak era Kolonial hingga Reformasi, di mana etnis Tionghoa digambarkan dengan identitas yang selalu berubah-ubah, hal ini dapat buktikan melalui sejarah kebijakan maupun norma hukum yang diberlakukan bagi etnis Tionghoa. Ditinjau dari zaman Kolonialis kebijakan *apartheid* yang dikeluarkan, yakni pembagian penduduk menjadi 3 kelas berdasarkan ras dan etnis. Orang Eropa ada di kelas paling atas, di kelas menengah di tempati oleh orang timur asing yakni Cina, sementara itu rakyat bumiputera ada dikelas terakhir atau paling bawah (Suryadiata,2002.hlm.103).

Kebijakan apartheid telah membuat adanya batas yang besar antara etnis Tionghoa dengan etnis pribumi, dan inilah yang menjadi awal pemicu konflik rasial, pemerintah Kolonial membuat macam-macam jenis pengeksklusian atau jurang pemisahan agar etnis Tionghoa tidak dekat dengan masyarakat lokal setempat (pribumi). Hal tersebut melahirlah stereotip atau stigma buruk dari masyarakat lokal terhadap etnis Tionghoa. Di samping dampak negatif tersebut etnis Tionghoa mendapatkan dampak positif dari kebijakan tersebut, yaitu adanya hak-hak istimewa dalam hal memonopoli kegiatan ekonomi (usaha), yang tentu saja sangat menguntungkan dan meningkatkan perekonomian etnis Tionghoa. Hal ini juga yang kelak akan menjadi pemicu utama dari lahirnya konflik sosial antara etnis Tionghoa dengan bumiputera pasca Indonesia merdeka, hal ini terjadi dikarenakan persaingan dibidang ekonomi dan perbedaan perekonomian yang sangat mencolok pasca Indonesia merdeka (Wertheim,1964, hlm.10). Sejatinya kedudukan ekonomi Tionghoa pada masa ini adalah warisan sejarah Kolonial hingga Orde Baru, dikarenakan kebijakan politik Belanda yang menjadikan etnis Tionghoa kelas menengah/*middleman*, dan kebijakan Orde Baru yang melarang etnis Tionghoa masuk bidang lain, kecuali bidang ekonomi (Suryadinata, 2002.hlm,60).

Kebijakan pemerintah Kolonial ini berbanding terbalik jika ditinjau dengan kebijakan pemerintah Indonesia pada masa Orde Lama dan Orde Baru, di mana pasca Indonesia merdeka pemerintah pusat menginginkan adanya asimilasi dan akulturasi etnis Tionghoa dengan masyarakat lokal setempat. Sayangnya keinginan terjadinya difusi tersebut memicu pemaksaan agar etnis Tionghoa meninggalkan agama asli mereka, serta kebudayaannya, sehingga etnis Tionghoa tidak bebas mengekspresikan identitas mereka di muka umum.

Pemaksaan ini juga memiliki alat yang menunjang demi terlaksananya difusi, bahkan alat ini menjadi bentuk diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, salah satu alat tersebut adalah UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 yang membedakan kewarganegaraan etnis Tionghoa dengan etnis lain, hal ini terlihat dari wajinya etnis Tionghoa memiliki SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) guna dapat mengakses akses-akses publik (Soyomukti,2012,hlm.276). Dalam rangka mengintegrasikan ideologi etnis Tionghoa ke dalam ideologi

Pancasila, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan bagi etnis Tionghoa, beberapa diantaranya antara lain: No. 127/U/Krp/1966 tentang penggantian nama, Instruksi Presiden No. 14/1967 yang memuat larangan perayaan hari raya keagamaan juga kebudayaan di tempat umum atau publik dan Instruksi Presidium Kabinet No. 37/U/ In/6/1967 berkaitan penyelesaian masalah Tionghoa. Perbedaan kelas sosial antara etnis Tionghoa dengan warga pribumi akibat kebijakan rezim era Kolonial, telah membentuk identitas etnis Tionghoa adalah kelompok berisikan orang yang tidak mau berbaur atau eksklusif. Aturan pemerintah era Kolonial ini sangat lah berbanding terbalik dengan aturan pemerintah setelah merdeka yakni era Presiden Sukarno dan Suharto yang sangat menginginkan etnis Tionghoa melakukan asimilasi dengan warga pribumi.

“...banyak peristiwa tragis akibat kecinaannya. Timbul persepsi yang menganggap mereka sebagai warga asing meskipun telah lahir dan menetap lama di Indonesia” Suryadinata (1986,hlm.115). Dari kutipan makan dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang berkuasa sangat mempengaruhi dinamika kehidupan etnis Tionghoa, pengeksklusian dan diskriminasi rezim kolonial telah membuat stereotipe buruk melekat pada etnis Tionghoa, belum lagi kebijakan pemerintah pasca merdeka yang banyak melarang etnis Tionghoa, secara tidak sengaja telah mensugesti masyarakat lokal bahwa etnis Tionghoa adalah orang asing, yang harus di lokalkan dengan segala cara, dan dampak ini masih dapat dirasakan hingga era reformasi.

“Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang memiliki kekuasaan itu” (Budiardjo,1993,hlm.35).

Pasca Indonesia meraih kemerdekaan, maka disitulah Indonesia telah mendapatkan kuasa penuh untuk mengatur daerah otonominya. Dan disitulah kemampuan untuk menyejahterakan dan mencegah terjadinya penjajahan ulang dilakukan, melihat etnis Tionghoa dengan jumlah penduduk yang minoritas, tetapi sangat unggul secara ekonomi. Telah membuat pemerintah khawatir, mengingat etnis Tionghoa yang tidak memiliki kesamaan nenek moyang dengan masyarakat

lokal Indonesia, ditambah lagi pada saat itu Indonesia belum kuat secara ekonomi. Keinginan untuk melindungi negara yang baru saja berdiri tersebutlah, yang menjadi faktor sangat kuat bagi pemerintah untuk membuat etnis Tionghoa dapat melakukan difusi dengan masyarakat lokal. Hal ini terjadi mengingat etnis Tionghoa sangat menjunjung kebudayaan leluhurnya, dan juga rata-rata mereka hidup secara berkelompok dalam kompleks pecinan. Program asimilasi dikerahkan oleh pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan, menghasilkan dinamika yang berbeda jauh dari dinamika pada era Kolonial bagi etnis Tionghoa.

Minoritas Tionghoa di Indonesia tidaklah homogen meskipun mereka berasal dari negara yang sama yakni RRC, sejatinya dari sudut kebudayaan etnis Tionghoa terbagi atas peranakan dan totok, dalam hal agama ada yang menganut Budha, Tridharma, Konghucu, Katolik, Kristen, Islam, dalam bidang ekonomi banyak yang kaya tetapi lebih banyak juga yang miskin. Karakter mereka pun beragam dan akan sesuai seperti di mana mereka tinggal, seperti Tionghoa yang tinggal dipulau Jawa akan memiliki karakter yang lemah lembut, berbeda dengan Tionghoa yang tinggal di Sumatera Utara akan memiliki karakter yang pemberani dan terus terang (Suryadinata,2002,hlm.17). Karenanya mengidentifikasi identitas etnis Tionghoa sesungguhnya tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena dalam tubuh etnis Tionghoa itu sendiri terjadi heterogenitas (Tan,1991,hlm.119).

Identitas etnis dan kultural orang Tionghoa di negara Indonesia terbentuk dari pengalaman lokal, yakni tempat di mana mereka tinggal dan berproses untuk membaaur dengan masyarakat di sekitarnya. Identitas Tionghoa Indonesia sangat heterogen hal ini disesuaikan dengan adaptasi dan akulturasi kondisi lingkungan masyarakat setempat (Susetyo,2002). Ketika etnis Tionghoa melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, maka disitulah akan terbentuk kepribadian mereka, sesuai dengan agen sosialisasi yang mempengaruhi mereka, oleh karena itu identitas etnis Tionghoa Indonesia tidaklah homogen, ini dikarenakan mereka sendiri memiliki banyak subsuku di negara asalnya, dan saat datang ke Indonesia mereka juga berbaur dengan masyarakat Indonesia yang memiliki banyak subsuku. Berkaitan dengan identitas seorang ahli bernama (Li,2000) mengatakan bahwa “.....identitas budaya sekelompok orang dipengaruhi oleh sejarah, budaya, geografi, politik (kekuasaan)...”. Oleh karena itu Tionghoa Jawa akan memiliki

karakter berbeda dengan Tionghoa Medan, Tionghoa Singkawang, Tionghoa Bangka dan Tionghoa di kota lain, karena tiap kota memiliki sejarah, budaya, geografi dan politik yang berbeda-beda dalam mempengaruhi pembentukan karakter atau kepribadian Tionghoa Indonesia.

Dampak dari kebijakan politik yang berkuasa, juga akan menghasilkan dinamika kehidupan yang berbeda bagi etnis Tionghoa, seperti dinamika yang terjadi di Kota Singkawang dan di pulau Jawa akan mengalami perbedaan. Contohnya pada etnis Tionghoa Jawa terkenal dengan kemapanan ekonominya, di Kota Jawa etnis Tionghoa rata-rata berprofesi sebagai pengusaha yang sukses dan kaya. Namun etnis Tionghoa di Kota Singkawang mayoritas dari mereka hidup dalam garis kemiskinan dan kesulitan serta bekerja menjadi seorang petani dan buruh. Faktor penyebabnya adalah peristiwa Mangkuk Merah 1967, di mana saat itu kebijakan pemerintah untuk memindahkan orang Tionghoa di daerah pedalaman ke daerah pesisir dengan cara paksa, menggunakan kekerasan, peristiwa tersebut banyak memakan korban jiwa, serta menjadikan faktor utama kemiskinan melanda mayoritas etnis Tionghoa di Kota Singkawang di masa awal pemerintahan Presiden Suharto yakni era Orde Baru (Superman,2017).

Dampak dari peristiwa 1967 adalah etnis Tionghoa di Singkawang yang miskin, tidak jarang akan menikahkan anak perempuan mereka dengan seorang pria berkebangsaan Taiwan yang status ekonominya tergolong mapan sampai kaya. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan perekonomian mereka (Sikwan dan Tiastuti,2004,hlm.49). Peristiwa tersebut merupakan 1 dari banyaknya perbedaan kehidupan yang terjadi antara etnis Tionghoa di Kota Singkawang dan Tionghoa yang ada di kota lain. Kebijakan dalam bidang ekonomi 1967 yang dibuat pada era Presiden Suharto telah memacu ekonomi para Tionghoa di Indonesia. Namun tidak demikian bagi Tionghoa di Kota Singkawang, akibat adanya pengusiran Tionghoa di pedalaman Kalimantan Barat ke daerah pesisir memicu adanya Tionghoa kaum pengungsi pada peristiwa 1967. Tionghoa pengungsi ini harus memulai kehidupannya kembali dari awal di Kota Singkawang tanpa perbekalan modal usaha apapun. Dari peristiwa di atas dapat ditarik benang merah bahwa masyarakat yang heterogen yakni memiliki ragam perbedaan ras, etnis, agama, dan budaya

membuat wacana menarik dan dilematis, peristiwa yang menjadi pekerjaan rumah di negara Indonesia yang harus diselesaikan. Hal serupa sejalan dengan pendapat ahli:

Koentjaraningrat (1969,hlm.13) “Sifat majemuk bangsa Indonesia selain menjadi sumber kebanggaan, dapat pula menjadi sumber konflik, baik antar suku bangsa maupun antar golongan. Unsur penting dalam usaha dan proses pembangunan negara kesatuan Indonesia adalah saling pengertian, intergrasi dan asimilasi di antara berbagai suku bangsa dan golongan”.

Keragaman etnis, ras, agama dan status ekonomi telah menjadikan Indonesia negara yang sangat kaya akan kebudayaan, dan kaya akan pengetahuan mengenai keragaman. Namun hal tersebut juga memicu terjadinya politik identitas, di mana pihak yang menjadi mayoritas akan berusaha untuk mengutamakan kepentingan kelompoknya, akibatnya adalah ada kelompok yang berkuasa dan ada kelompok yang dikuasai. Hal ini akan memicu ketidakpuasan dan berujung konflik, latar belakang penduduk yang beragam juga rentang memicu kesalah pahaman, dan stereotipe yang lagi-lagi akan berujung pada perpecahan akibat nilai-nilai, norma dan kebudayaan yang disepakati berbeda. Sejak usia dini generasi penerus bangsa harus mulai diajarkan mengenai toleransi akan heterogenya masyarakat Indonesia. Harus adanya Pendidikan karakter sejak dini bahwa perbedaan adalah hal yang biasa dan ada di setiap sendi kehidupan. Semboyan Bhineka Tunggal Ika harus lebih digaungkan di sekolah-sekolah.

“Permasalahan dalam proses pengintegrasian ragam etnis di negara Indonesia sangatlah berkaitan erat dengan mengubah suatu stereotip, stigma, juga prasangka antar warga suku bangsa yang berlainan, semua masyarakat harus sadar bahwa dalam kehidupan bernegara hal yang terutama adalah mengejar kesempatan kerja serta pendidikan yang terbatas” (Koentjaraningrat,1982,hlm.384).

Harus adanya penanaman bahwa memberikan stereotip negatif pada etnis berlainan yang belum pasti kebenarannya adalah sebuah kekeliruan, yang akan menghambat pembangunan negara untuk menjadi negara maju. Dari pemaparan latar belakang yang dilakukan peneliti di atas, telah dijelaskan bahwa skripsi ini

berfokus terhadap kebijakan pemerintahan dan kaitannya dalam mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat etnis minoritas Tionghoa. Khususnya yang ada di Kota Singkawang, skripsi ini dibatasi oleh 2 batasan, yaitu batasan spasial dan batasan temporal. Batasan spasial adalah peneliti akan fokus mengkaji daerah Singkawang, sedangkan batas temporal peneliti akan menfokuskan penelitian pada tahun menjelang 1967 sampai 2014. Pembatasan perlu dilakukan supaya pembahasan tidak terlalu meluas atau menjadikannya seperti tulisan dalam Sosiologi karena Sejarah diartikan sebagai peristiwa dalam waktu dan tempat tertentu. Alasan peneliti memilih Tionghoa di Kota Singkawang sebagai penelitian ada 2:

Pertama, di Kota Singkawang secara kuantitatif dominasi penduduk terbanyak dipegang oleh etnis Tionghoa, sehingga etnis Tionghoa adalah mayoritas. Hal ini hanya terjadi di Kota Singkawang dan menarik sekali bagi peneliti kaji lebih jauh, bagaimana dinamika kehidupan mereka dalam aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi, ketika menjadi etnis mayoritas disuatu kota.

Kedua, Menjelang tahun 1967 daerah Singkawang menjadi penampungan dari pengungsi Tionghoa yang diusir dari pedalaman, akibat peristiwa PGRS/PARAKU. Jika dilihat dari keadaan perekonomian dampak dari pengungsian tersebut, etnis Tionghoa di Kota Singkawang mempunyai karakteristik perekonomian sangat berbeda dengan etnis Tionghoa di Provinsi Jawa dan provinsi lain. Ini sangat menarik peneliti melihat banyaknya Tionghoa Singkawang yang berprofesi sebagai petani, buruh, PNS bahkan masuk ke dunia politik, dari pada pengusaha, lalu adanya eksploitasi amoy (wanita Tionghoa Singkawang) untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Alasan tahun 1967-2014 dipilih adalah, tahun 1967 di Provinsi Kalimantan Barat terjadi peristiwa diskriminasi rasial terbesar terhadap etnis Tionghoa, peristiwa ini dikenang dengan julukan Mangkuk Merah, peristiwa rasial ini didukung oleh negara yang menyebabkan etnis Tionghoa yang bermukim di hutan pedalaman dipaksa keluar dari pedalaman ke pesisir pantai, salah satunya ke Singkawang (Aju,2017.hlm.186). Hal ini membuat mereka yang biasa tinggal di pedalaman harus beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang baru di datangi,

peristiwa rasial terbesar dan dampaknya yang sangat besar tersebutlah yang menarik peneliti untuk mengkaji tahun 1967. Tahun 2014 dipilih karena ditahun itu adalah masa-masa implementasi dalam praktek kehidupan sehari-hari, bukan lagi tahun masa transisi menuju demokrasi tanpa diskriminasi. Pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini disahkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menegaskan etnis Tionghoa yang lahir di Indonesia termasuk Indonesia asli (Aju,2017.hlm.224).

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang peneliti uraikan di atas, maka pokok permasalahannya dapat disimpulkan adalah: “Bagaimana Dampak Kebijakan Pemerintahan Terhadap Dinamika Kehidupan Masyarakat Etnis Tionghoa di Kota Singkawang Periode 1967-2014?.”, Yang kemudian peneliti jabarkan kedalam beberapa pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi Masyarakat Tionghoa Singkawang Menjelang 1967?
2. Apa saja kebijakan pemerintah RI yang mempengaruhi dinamika etnis Tionghoa Singkawang 1967-2014?
3. Bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap dinamika etnis Tionghoa di Kota Singkawang 1967-2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi Masyarakat Tionghoa Singkawang Menjelang 1967.
2. Menganalisis kebijakan pemerintah RI yang mempengaruhi dinamika etnis Tionghoa Singkawang 1967-2014.
3. Menjelaskan dampak kebijakan pemerintah terhadap dinamika etnis Tionghoa di Kota Singkawang 1967-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menambah hasanah penulisan sejarah lokal.
2. Mendokumentasikan kehidupan masyarakat Tionghoa di Singkawang.
3. Menjadi referensi bagi siswa SMA/MA/SMK karena selama ini Tionghoa, yang tidak memiliki sejarah lokal. Pendidikan sejarah yang ditanamkan harus mengakui peran dari masing-masing etnis dalam sejarahnya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Mengenai struktur organisasi dalam skripsi ini maka peneliti jabarkan yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bagian ini peneliti memaparkan latar belakang peneliti melakukan penelitian, rumusan masalah yang dalam peneliti skripsi ini, tujuan dalam penelitian skripsi ini, manfaat dari penelitian skripsi ini dibuat serta struktur dari bagian-bagian skripsi.

Bab II Kajian Pustaka. Di sini peneliti menjelaskan kajian pustaka yang dilakukan peneliti disertai dengan teori-teori yang mendukung permasalahan serta upaya pemecahan masalah yang diambil.

Bab III Metode Penelitian. Akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian. Selain dalam bab ini juga akan dijelaskan metode penelitian yang dilakukan, narasumber penelitian, Teknik dalam melakukan pengumpulan data menjadi suatu fakta.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Akan menyajikan hasil penelitian skripsi yang berjudul: *Dinamika Kehidupan Masyarakat Tionghoa Singkawang Tahun 1967 – 2014*, yang didasarkan data yang dipilah menjadi fakta sejarah dan dapat dipertanggung jawabkan, terdapat juga informasi yang telah dikolaborasikan dengan macam-macam literatur dan sumber yang relevan.

Bab V Simpulan dan Rekomendasi. Menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi yang telah dilaksanakan peneliti sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian juga memberikan rekomendasi untuk peneliti yang ingin meneliti Tionghoa Singkawang selanjutnya.